

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQH AL SIYĀSAH* TERHADAP PASAL 14
DAN PASAL 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
5 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh

Hindun Miratul Ummah

NIM. 05010420006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hindun Miratul Ummah
NIM : 05010420006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Al Siyāsah Terhadap
Pasal 14 Dan Pasal 28 Peraturan Dacrah
Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Hindun Miratul Ummah

NIM. 05010420006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hindun Miratul Ummah
NIM. : 05010420006
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Al Siyāsah Terhadap Pasal
14 Dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 5 Tahun 2016

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 1 Desember 2023

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hindun Miratul Ummah

NIM. : 05010420006

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II




Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 18 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. F. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hindun Miratul Ummah
NIM : 05010420006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : hindunumah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis dan *Fiqh Al Sijāsab* Terhadap Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Februari 2024

Penulis

(Hindun Miratul Ummah)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang materinya tentang masa bakti ketua RT dan ketua RW bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan judul “Analisis Yuridis dan *Al Fiqh Al Siyāsah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Studi Analisis Masa Bakti Ketua RT Dan Ketua RW)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis dan analisis *Fiqh Al Siyāsah Al dustūriyah* Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Guna menjawab rumusan masalah penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini memerlukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan kitab *Fiqh Al Siyāsah* yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data tersebut terkumpul barulah digunakan untuk penelitian dengan teori hukum positif juga teori *Fiqh Al Siyāsah Al dustūriyah* menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil dari penelitian Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah perbedaan masa bakti ketua RT dan ketua RW menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Namun, mekanisme terkait ketua RT maupun ketua RW apabila berhenti atau diberhentikan dan digantikan oleh wakilnya tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, sehingga berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan pengaturan masa bakti ketua RT dan ketua RW dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 menimbulkan kemudharatan dan menjauhi kemaslahatan, sebab mengakibatkan ketua RT dan ketua RW di Kabupaten Gresik tidak memperoleh kesempatan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun, mekanisme penggantian ketua RT atau ketua RW yang berhenti atau diberhentikan dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 diperbolehkan dalam Islam guna mencegah ke mafsadatan yang muncul akibat kekosongan jabatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar pemerintah daerah menghiraukan ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri dalam menyusun peraturan daerah, agar masa bakti ketua RT dan RW di wilayah Gresik tidak berbeda-beda. Pemerintah daerah kabupaten Gresik segera melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	20
A. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	20
B. Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah	25
1. Konsep otonomi daerah.....	25
2. Peraturan Daerah	30
C. Peraturan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan NKRI	33
1. Kedudukan Menteri.....	33

2. Peraturan Menteri.....	34
D. <i>Fiqh Al Siyāsah Al Dustūriyah</i>	38
1. Siyāsah dustūriyah.....	38
2. al-sulthah al-tasyrī'iyah.....	42
BAB III.....	47
PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2016 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018....	47
A. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.....	47
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.....	54
BAB IV.....	64
ANALISIS YURIDIS DAN <i>FIQH AL SIYĀSAH</i> TERHADAP PASAL 14 & PASAL 28 PERDA KAB. GRESIK NO. 5 TAHUN 2016.....	64
A. Analisis Yuridis Terhadap Pasal 14 & Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ..	64
B. Analisis <i>Fiqh Al Siyāsah Al Dustūriyah</i> Terhadap Pasal 14 & Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.....	73
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amin Suprihatini. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ardilafiza, Beni Kurnia, Amancik, and Annisa Salsabila. "Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Legislasi Indonesia* Vol. 19, no. 3 (2022): 374.
- Ari Kurniawan. "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Aslati and Afrizal. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Masfadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani)." *Jurnal An-Nida'* Vol. 41, no. 01 (2017): 19.
- Astri Wulandari and Zainuddin. "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 2, no. 2 (2021): 81.
- Bambang Antariksa. "Penerapan Hierarku Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 01, no. 1 (2017): 24.
- Bambang Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media (Anggota IKAPI), 2021.
- Budiarti. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 03, no. 02 (2017): 44.
- Dayanto and Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*. Cetakan 2. Jakarta: PT Suara Agung, 2017.

- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dzul Hilmi Al Hafidh. "Pemilihan Pengurus RT & RW Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Eka Sihombing. "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 16, no. 01 (2016): 99.
- Fatin Hamamah and Sarip. "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme." *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 2, no. 02 (2019): 176–77.
- Fatkul Muin. "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 08, no. 01 (2014): 73–74.
- Fatmawati and Kurnia Majied. *Fiqh Politik*. Gowa: Pustaka Almaida, 2014.
- Hasanuddin Hasim. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* Vol. 01, no. 2 (2017): 127.
- Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, and Tito Inouva Harada. "Siyasah Dusturiyyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Sambas." *Hermeneutika* Vol. 05, no. 01 (2021): 65.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- I Made Suwandi. *Reformasi Otonomi Daerah*. Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2017.
- Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Pertama. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, no. 04 (2022): 870.
- Kiki Endah. "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Moderat* Vol. 02, no. 02 (2016): 799–800.

- La Samsu. "Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah, al-Sulṭah al-Tanfiziyyah, al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah." *Tahkim* Vol. XIII, no. 01 (2017): 158.
- M. Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Vol. 01, no. 01 (2022): 81.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Marten Bunga. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* Vol. 19, no. 02 (2017): 14.
- Martha Eri Safira. *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya, n.d.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fatihul Khoirin. "Fiqh Siyasah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mukhsin Nyak Umar. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaruan Hukum Islam*. Cetakan Kedua. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Muntoha dan Yusdani. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Cetakan I. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Nanang Nugraha. *Implementasi Otonomi Daerah Dan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2017.
- Ni'matul Huda. "Kedudukan Dan Materi Muatan Persetujuan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia* Vol. 28, no. 3 (2021): 562.
- Nining Purwatmini, Shalahudin, and Hari Spto Yudiarso. "Peran Ketua Rukun Warga Sebagai Servant Leader Dan Masyarakat Untuk Keberhasilan

- Mendapatkan Proyek Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 8, no. 01 (2020): 54.
- Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma, Zulkarnain. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny, 2019.
- Nuruddin dan Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. NTB: CV. Alfa Press, 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga*. Kabupaten Gresik: Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 5, n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*. Accessed November 13, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126362/permendagri-no-5-tahun-2007>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. Accessed November 12, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>.
- Pratisto Ilham Pranoto and Gayatri Dyah Suprobowati. “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, no. 03 (2022): 395.
- Rachmat Trijono. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Rohmat Kurnia. *Panduan RT Dan RW*. Bogor: Bee Media Pustaka, 2019.
- Sofyan Apendi. “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional.” *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 07, no. 01 (2021): 118.
- Sofyan Hadi. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat).” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* Vol. 13, no. 26 (2017): 261.
- Solehuddin Harahap. “Siyasah Syar’iyyah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2022): 115.
- Ubaiyana and Mar’atun Fitriah. “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 33, no. 2 (2021): 607.

Wahono Sumadiono. *Pedoman Umum Organisasi Dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wayne Morrison. *Yurisprudensi: Teori Murni Hans Kelsen*. Translated by Khozim. Bandung: Nusamedia, 2021.

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, no. 02 (2017): 128.

Yudi Suparyanto. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A